

Manajemen Pengelolaan Penyewaan Alat Berat Dalam Meningkatkan Pelayanan Pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Poso

Alif Y Walenta ^{a,1}

^a Jurusan Administrasi Publik, FISIP Universitas Sintuwu Maroso, Jl. P. Timor No. 1, Poso, Sulawesi Tengah, 94619

¹ email penulis pertama*: alifwalenta@unsimar.ac.id

*korespondensi penulis : alifwalenta@unsimar.ac.id

INFO ARTIKEL

Riwayat Artikel:

Diterima: 03-03-24

Disetujui: 19-03-24

Kata Kunci:

Manajemen
Pelayanan

Keywords:

Management
Service

ABSTRAK

Abstrak: Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana Manajemen Pengelolaan Penyewaan Alat Berat Dalam Meningkatkan Pelayanan Pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Poso, serta factor apa saja yang mempengaruhinya. Peneliti menggunakan metode deskriptif kualitatif dalam menjelaskan hasil penelitian menurut indikator yang sudah ditetapkan sebelumnya. Data yang digunakan dalam penelitian ini, masing-masing; data primer, yaitu data yang di peroleh dari hasil observasi dan wawancara serta data sekunder, yaitu data yang di kumpulkan melalui hasil studi pustaka dan melalui penelusuran dokumen-dokumen resmi yang ada kaitannya dengan permasalahan penelitian. Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa; secara umum kegiatan *Planing* (Perencanaan); *Organizing* (Pengorganisasian); *Actuating* (Penggerakan); dan *Controlling* (Pengawasan) yang merupakan bagian dari pada fungsi manajemen, adalah belum di jalankan secara optimal. Akibatnya manajemen pengelolaan penyewaan alat berat pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Poso yang sudah dilakukan selama ini, belum dapat memberikan pelayanan kepada masyarakat sebagaimana yang di harapkan.

Abstract: This study aims to determine how the Management of Heavy Equipment Rental Management Improves Services at the Public Works Department of Poso Regency, and what factors influence it. The researcher used a qualitative descriptive method in explaining the results of the study according to previously determined indicators. The data used in this study, respectively; primary data, namely data obtained from the results of observations and interviews and secondary data, namely data collected through the results of literature studies and through tracing official documents related to the research problem. Based on the results of the study, it is known that; in general the activities of Planning (Planning); Organizing (Organizing); Actuating (Movement); and Controlling (Supervision) which are part of the management function, have not been carried out optimally. As a result, the management of heavy equipment rental management at the Public Works Department of Poso Regency that has been carried out so far, has not been able to provide services to the community as expected.



PENDAHULUAN

Sejak berlakunya otonomi daerah, kabupaten memiliki kewenangan sendiri untuk menjalankan pemerintahannya sendiri. Secara yuridis diakui dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, bahwa kabupaten daerah atau disebut dengan nama lain. Pemerintah Nasional dan berada di Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang telah membawa perubahan yang mendasar dalam sistem dan struktur Pemerintahan Daerah serta membawa dampak yang sangat luas bagi penyelenggaraan pemerintahan, perencanaan pembangunan, pengelolaan keuangan, dan sistem penganggaran dalam menunjang pelaksanaan pemerintahan di daerah. Pembangunan nasional merupakan rangkaian upaya pembangunan yang berkesinambungan meliputi seluruh masyarakat, bangsa dan negara melaksanakan tugas mewujudkan tujuan nasional yang diamanatkan oleh pembukaan Undang-Undang Dasar 1945.

Undang-undang no 33 tahun 2004 tentang perimbangan keuangan antar pemerintah pusat dan pemerintah daerah dalam pemberian otonomi daerah telah memacu semua pemerintah provinsi/kabupaten/kota, dan memacu sumber-sumber potensi pendapatan asli daerah sebagai upaya untuk memenuhi kebutuhan pembiayaan pembangunan. Otonomi Daerah adalah hak, wewenang dan kewajiban daerah otonomi untuk mengurus dan mengurus sendiri urusan pemerintah dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Dalam peraturan tersebut pemerintah pusat dan daerah merupakan suatu kesatuan yang tidak dapat di pisahkan dalam upaya penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan kepada masyarakat. Semangat undang-undang tersebut bukan keinginan untuk melimpahkan kewenangan pembiayaan pembangunan pemerintah pusat ke pemerintah daerah, tetapi lebih penting adalah peningkatan efisiensi dan efektivitas pengelolaan penyewaan alat berat dalam rangka peningkatan kesejahteraan dan pelayanan kepada masyarakat. Semangat lain yang terkandung di dalamnya yaitu desentralisasi, demokratisasi, transparansi dan akuntabilitas menjadi sangat dominan dalam mewarnai proses penyelenggaraan pemerintahan dan pengelolaan keuangan di daerah.

Salah satu Dinas yang sangat berperan dan berpotensi untuk menghasilkan pendapatan adalah dinas pekerjaan umum. Sesuai peraturan daerah no 3 tahun 2012 tanggal 25 mei 2012 tentang perubahan atas peraturan daerah kabupaten Poso nomor 12 tahun 2010 tentang organisasi dan tata kerja dinas daerah yang terdapat pada bagian ketujuh pasal 19 dan pasal 20. Dinas Pekerjaan Umum mempunyai unit teknis yang mengelola peralatan besar dan peralatan bantu untuk di manfaatkan secara optimal dalam pemberian jasa yang maksimal bagi pembangunan nasional. Secara teknis pemanfaatan peralatan tersebut di sewakan dalam rangka mempercepat dan menyelesaikan proyek pemerintah dan swasta. Penggunaan peralatan tersebut di tetapkan dengan keputusan menteri pekerjaan umum no: 585/KPTS/1988 tentang pedoman penggunaan peralatan di lingkungan departemen pekerjaan umum, dan peraturan daerah no 8 tahun 2011 tentang retribusi jasa usaha, terdapat pada bab II golongan dan jenis retribusi, pasal 2, dan bab III, tentang retribusi pemakaian kekayaan daerah, pada bagian pertama, tentang nama, obyek, subyek, dan wajib retribusi, dan bagian ketiga tentang struktur dan besarnya tarif. Jumlah pendapatan sewa peralatan dari tahun 2019 sampai 2022 mengalami penurunan. Pada tahun 2019 sejumlah Rp 212.363.367, pada tahun 2020 sejumlah Rp 310.687.357, dan pada tahun 2021 menurun sejumlah Rp 248.037.128, pada tahun 2022 menurun Rp 184.665.312. Berdasarkan fenomena pendapatan sewa yang di kemukakan terdapat kecenderungan ketidak stabilnya penerimaan sewa peralatan di maksud, atas dasar masalah tersebut diatas, yang merupakan sumber Pendapatan Asli Kekayaan Daerah (PAD) yang harus di setorkan langsung kepada kas daerah dan selanjutnya akan di gunakan untuk kegiatan belanja kegiatan daerah secara berkelanjutan (sustainable) melalui RAPBD yang di susun selanjutnya.

Oleh karena itu dibutuhkan manajemen yang digerakan oleh pimpinan yang merupakan penggerak dari sumber-sumber dan alat-alat serta orang-orang dalam suatu organisasi. Hal demikian berarti bahwa pihak manajemen tidaklah bekerja sendiri, melainkan melalui kerjasama dengan orang lain atau yang lebih dikenal sebagai bawahan yang digerakan sedemikian rupa sehingga bawahan tersebut memberikan pengabdian

terhadap organisasi terutama dalam cara kerja yang efektif dan efisien. Jadi jelaslah bahwa, pimpinan yang efektif adalah pimpinan yang mampu menumbuhkan, memelihara dan mengembangkan usaha dan iklim yang komperatif dalam kehidupan organisasi. Ini mengartikan bahwa kemajuan suatu organisasi sangat dipengaruhi oleh manajemen yang baik dan seorang pimpinan bersama-sama dilakukan dengan anggotanya atau bawahannya. Sehingga manajemen dapat diartikan bagaimana cara manajer/pimpinan mengatur, membimbing dan memimpin semua orang yang menjadi bawahannya agar usaha yang sedang digarap dapat mencapai tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya. Sedangkan untuk mengatur kegiatan-kegiatan atau pelayanan perizinan disebut manajemen pelayanan.

Manajemen dapat didefinisikan sebagai kemampuan atau ketrampilan untuk memperoleh suatu dari hasil dalam rangka mencapai tujuan melalui kegiatan-kegiatan orang lain. Menurut Ismail dkk (1991 : 25) memberi batasan tentang manajemen sebagai berikut : “Manajemen adalah proses kerjasama yang menggerakkan tindakan-tindakan mulai dari perencanaan, pengorganisasian, dan penggunaan sumber-sumber daya lainnya agar mencapai tujuan organisasi yang telah diharapkan”. Manajemen organisasi adalah proses pengorganisasian, perencanaan, memimpin dan mengendalikan sumber daya dalam suatu entitas dengan tujuan keseluruhan mencapai tujuan. Tujuan adanya manajemen organisasi ini adalah untuk memberikan rasa aman dan kesatuan kepada karyawan. Sehingga dalam kinerjanya dapat lebih efektif. Manajemen organisasi yang efektif mmengarah kesusasana damai dan positif ditempat kerja. Karyawan menyelesaikan tugas-tugas dalam jangka waktu yang ditetapkan dan karyawan tetap setia terhadap pekerjaan mereka dan tidak memperlakukan pekerjaan sebagai beban merupakan salah satu hasilnya. Sehubungan dengan hal tersebut diatas, berdasarkan pengamatan awal peneliti pada objek yang akan diteliti, gambaran mengenai manajemen pengelolaan penyewaan alat pada Dinas Pekerjaan umum Kabupaten Poso belum, menjadikan suatu manajemen pengelolaan yang baik. hal ini antara lain terlihat dari banyak hal yang menghambat proses peminjaman alat berat di Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Poso, antara lain Perencanaan, Pengorganisasian, Penggerakan dan Pengawasan”.

Oleh karena itu penelitian ini bertujuan untuk mengetahui manajemen pengelolaan penyewaan alat berat dalam meningkatkan pelayanan pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Poso juga mengetahui faktor-faktor apa yang mempengaruhi manajemen pengelolaan penyewaan alat berat dalam meningkatkan pelayanan pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Poso.

METODE PENELITIAN

Untuk menjawab pertanyaan dan tujuan penelitian, penelitian ini menggunakan jenis penelitian deskriptif kualitatif sesuai dengan situasi sebenarnya di lapangan. Studi ini menggunakan metode observasi, wawancara, dan dokumentasi yang berhubungan dengan pelayanan pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Poso. Analisis data dilakukan dengan model analisis deskriptif (Sugiyono, 2013) dimana analisis data dilakukan secara interaktif dan berlangsung secara terus menerus sampai tuntas sehingga datanya jenuh melalui reduksi, penyajian dan penarikan kesimpulan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Sehubungan dengan maksud dan tujuan dari pada penelitian ini, maka dalam pembahasan ini, variabel yang digunakan terkait dengan manajemen pengelolaan penyewaan alat berat dalam meningkatkan pelayanan pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Poso, adalah; perencanaan (*planing*), pengorganisasian (*organizing*), penggerakan (*actuating*), dan pengontrolan (*controlling*).

a. Perencanaan (*planing*).

Perencanaan (*planing*) adalah merupakan bagian yang terpenting dari pada kegiatan manajemen. Perencanaan (*planing*) yang dilakukan oleh organisasi atau badan tertentu, dapat berwujud aktifitas-aktifitas mengenai pekerjaan apa yang akan di laksanakan, bilamana, di mana, dan bagaimana cara melaksanakannya. Lebih tegasnya lagi, aktifitas perencanaan itu menyangkut bilamana, di mana, dan bagaimana cara melaksanakan atau tindakan-tindakan apa yang akan dilakukan sehingga hal tersebut dapat dijadikan pedoman dalam kegiatan. Terkait dengan pengelolaan penyewaan alat berat di dalam rangka peningkatan pelayanan Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Poso kepada masyarakat sebagai pengguna jasa, maka kegiatan perencanaan pengelolaan penyewaan alat berat tersebut sudah harus ada ketetapan yang jelas soal bagaimana atau bilamana alat berat tersebut dapat dipergunakan, dan berapa besar biaya yang harus di tanggung oleh masyarakat sebagai pengguna jasa. Dalam hal ini, ketetapan soal bagaimana atau bilamana alat berat tersebut dapat di gunakan dan berapa besar biaya yang harus di tanggung oleh pengguna, harus diketahui dengan pasti oleh masyarakat sebagai pengguna jasa. Sehingga, ketika masyarakat sebagai pengguna jasa ingin menggunakan atau menyewakan alat berat tersebut, mereka sudah mengetahui kapan dan bilamana alat berat tersebut dapat digunakan dan berapa biaya yang harus mereka siapkan. Sehubungan dengan hal tersebut, berdasarkan hasil observasi peneliti pada objek yang diteliti diketahui bahwa; perencanaan yang terkait dengan pengelolaan penyewaan alat berat yang ada pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Poso, ada dilakukan. Hal ini seperti yang diungkapkan oleh Kepala Bidang Perencanaan Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Poso, mengatakan;

“ Menyangkut bagaimana pengelolaan penyewaan alat berat yang ada di Dinas PU, semuanya telah dilalui dengan perencanaan. Jadi soal bagaimana cara penggunaannya, berapa biaya sewa dari setiap unit alat berat yang ada, semuanya telah di tetapkan dalam perencanaan tersebut. (Wawancara, April 2023). Dari hasil wawancara tersebut di atas, jelas sekali memberikan gambaran pada kita, bahwa; perencanaan yang terkait dengan pengelolaan penyewaan alat berat yang ada pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Poso, ada dilakukan. Hal ini dapat diartikan bahwa; segala hal yang berkaitan dengan pengelolaan penyewaan alat berat yang ada pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Poso (termasuk pengelolaan waktu penggunaan dan biaya penggunaannya), sudah di tetapkan dalam perencanaan tersebut. Artinya, bagaimana dan kapan waktu alat berat dimaksud bisa digunakan oleh masyarakat sebagai pengguna jasa, semuanya telah di atur dalam ketetapan tersebut. Demikian juga dengan berapa besar biaya dari penggunaan alat berat tersebut, juga sudah di atur dalam ketetapan tersebut.

Sehubungan dengan hal tersebut, dari hasil wawancara peneliti dengan beberapa narasumber - masyarakat sebagai pengguna jasa - yang berhasil di wawancarai, diperoleh gambaran bahwa; soal waktu dan biaya penggunaan alat berat yang ada pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Poso, masih belum diketahui persis oleh masyarakat sebagai pengguna jasa. Terkait dengan waktu yang belum diketahui persis oleh masyarakat sebagai pengguna jasa, antara lain bisa dilihat dari ketidaktahuan mereka soal kapan waktu yang pasti dari alat berat yang akan mereka gunakan dapat digunakan. Terkait dengan biaya yang belum diketahui persis oleh masyarakat sebagai pengguna jasa, antara lain bisa di lihat dari ketidakjelasan besaran biaya sesungguhnya yang harus diberikan ketika mereka akan menggunakan/ menyewakan alat berat tersebut. Cerminan akan ketidaktahuan masyarakat/ pengguna jasa terhadap waktu dan besaran biaya penggunaan alat berat tersebut, bisa dilihat dari ungkapan salah seorang narasumber “B “ dalam suatu wawancara, mengatakan;

“ Tidak ada kepastian yang diberikan kepada kami, soal kapan alat berat yang ada pada Dinas PU bisa digunakan. Jadi biasanya, jauh hari sebelumnya kami sudah mendaftarkan diri untuk penggunaan alat berat tersebut. Selanjutnya, kami tinggal menunggu informasi dari mereka soal kapan alat berat yang kami butuhkan itu bisa digunakan. (Wawancara, April 2023). Selanjutnya, soal berapa besar biaya penggunaan dari pada alat berat dimaksud, dikatakan; “Kalau soal berapa besar biaya penggunaan dari pada alat berat tersebut jujur saja, kami tidak tahu persis. Kami hanya tahu lewat teman-teman saja yang sudah pernah menggunakannya. Jadi, berapa saja biaya penggunannya dan kalau itu tidak terlalu memberatkan kami, yah’ kami penuhi saja. “(Wawancara, April 2023). Bertolak dari hasil observasi dan hasil wawancara seperti yang sudah dipaparkan terlebih dahulu di atas, jelas sekali memberikan gambaran pada kita bahwa; masyarakat sebagai pengguna jasa tidak tahu persis soal waktu dan biaya penggunaan alat berat yang ada pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Poso. Dengan demikian dapat dikatakan, bahwa; walaupun perencanaan yang terkait dengan pengelolaan penyewaan alat berat ada dilakukan oleh Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Poso, namun apa yang telah ditetapkan dalam perencanaan yang sudah dilakukan, masyarakat sebagai pengguna jasa tidak mengetahuinya.

b. Pengorganisasian (Organizing).

Pengorganisasian (Organizing) adalah kegiatan yang berhubungan dengan usaha-usaha membuat struktur organisasi yang menyangkut tentang wewenang formal dan tanggung jawab melalui penentuan batas-batas tugas, kegiatan-kegiatan mengkoordinasikan bagian-bagian dalam mencapai tujuan yang telah ditentukan, pengelompokan kegiatan yang diperlukan untuk melaksanakan rencana dalam unit-unit kerja, serta menentukan hubungan kerja dalam unit-unit kecil.

Dalam konteks manajemen pengelolaan penyewaan alat berat pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Poso, pengorganisasian (organizing) tugas pekerjaan pegawai pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Poso (khususnya pegawai yang ada pada Bidang Bina Marga), juga dinilai penting untuk dilakukan guna menghindari adanya tumpang tindih tugas pekerjaan dan tanggung jawab pegawai di dalam rangka pengelolaan penyewaan alat berat dimaksud. Jadi dalam hal ini, pengorganisasian

(organizing) tugas pekerjaan pegawai yang berkaitan dengan kegiatan pengelolaan penyewaan alat berat tersebut, harus dilakukan secara jelas agar apa yang menjadi harapan dari pada kegiatan pengelolaan penyewaan alat berat dimaksud boleh berjalan sesuai dengan yang sudah ditetapkan sebelumnya.

Sehubungan dengan hal tersebut, maka yang akan menjadi sorotan utama terkait dengan pelaksanaan pengorganisasian (organizing) tugas pekerjaan pegawai dalam pengelolaan penyewaan alat berat yang ada pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Poso, adalah menyangkut soal; pembagian tugas, batas tugas dan tanggung jawab pegawai terhadap pengelolaan penyewaan alat berat yang ada pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Poso. Seperti yang sudah dikemukakan terlebih dahulu di atas, bahwa pelaksanaan pengorganisasian (organizing) tugas pekerjaan pegawai adalah tidak lain dimaksudkan untuk menghindari adanya tumpang tindih tugas pekerjaan dan tanggung jawab pegawai di dalam rangka pengelolaan penyewaan alat berat yang ada pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Poso.

Bertolak dari pemahaman tersebut, maka hal-hal yang berkaitan dengan tugas pekerjaan, serta batas tugas dan tanggung jawab pegawai terhadap pengelolaan penyewaan alat berat yang ada pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Poso, harus dilakukan secara jelas agar apa yang menjadi harapan dari pada kegiatan pengelolaan penyewaan alat berat dimaksud boleh berjalan sesuai dengan yang sudah ditetapkan sebelumnya. Berdasarkan hasil observasi peneliti pada objek yang di teliti, di peroleh gambaran bahwa secara umum pembagian tugas serta batas tugas dan tanggung jawab pegawai dalam pengelolaan penyewaan alat berat yang ada pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Poso, adalah belum dilakukan sebagaimana yang diharapkan alias kurang jelas. Masih seringnya terjadi kekurangjelasan tugas antara pegawai satu dengan lainnya, seperti; siapa yang akan mengoperasikan alat berat ketika alat berat tersebut akan digunakan/ di pakai oleh penyewa/ pengguna jasa, siapa yang akan mengawasi ketika alat berat tersebut digunakan, adalah fakta yang memberikan petunjuk bahwa pengorganisasian (organizing) tugas pekerjaan pegawai terkait dengan pengelolaan penyewaan alat berat yang ada pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Poso, belum dilakukan sebagaimana yang diharapkan. Sehubungan dengan hal ini, dari hasil wawancara peneliti dengan beberapa narasumber, juga diperoleh gambaran yang sama, dimana tugas pekerjaan seperti; siapa yang akan mengoperasikan alat berat ketika alat berat tersebut akan digunakan/ di pakai oleh penyewa/ pengguna jasa pada waktu itu, siapa yang akan mengawasi ketika alat berat tersebut akan digunakan pada waktu itu, adalah tidak jelas. Menurut mereka (baca: petugas/ pegawai yang akan mengoperasikan dan mengawasi alat berat), nanti mereka tahu ketika sudah ada semacam penugasan dari pimpinan. “ Selama ini, seperti itu Pak’, nanti ada pekerjaan baru kami diberitahukan. Jadi tidak ada semacam tugas yang paten untuk setiap petugas seperti yang Bapak maksud, khususnya dalam hal pengoperasian alat berat ... (Wawancara dengan “H “, Mei 2023). Dengan nada yang sama, juga seperti yang tercermin dari ungkapan narasumber “D “dalam suatu wawancara yang berbeda, mengatakan ; “ Kalau soal pembagian tugas, batas tugas dan tanggung jawab seperti yang Bapak maksud, sebenarnya sudah ada di atur terkait dengan pengelolaan penyewaan alat berat yang ada di Dinas kami. Hanya saja memang, biasanya dalam praktek lapangan, hal ini tidak

seperti yang sudah di atur. Apalagi penyewaan alat berat itu'kan, biasanya tidak menentu. Kadang biasanya, sudah ada alat yang siap untuk bisa digunakan/ di sewakan, akan tetapi operator yang di tugaskan untuk itu, berada di tempat yang lain dengan tugas yang sama (Wawancara, Mei 2023).

Dari hasil wawancara seperti yang terlihat di atas, jelas sekali memberikan gambaran pada kita bahwa dalam pengelolaan penyewaan alat berat pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Poso tidak dibarengi dengan kegiatan pengorganisasian (*organizing*) tugas pekerjaan, serta batas tugas dan tanggung jawab yang jelas kepada pegawai sebagai pelaksana tugas pekerjaan itu sendiri. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa; pengorganisasian (*organizing*) tugas pekerjaan, serta batas tugas dan tanggung jawab dalam pengelolaan penyewaan alat berat pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Poso, adalah belum dilakukan sebagaimana yang diharapkan.

c. *Actuating* (Pergerakan)

Penggerakan adalah tindakan menggerakan orang-orang agar mau bekerja dengan penuh kesadaran untuk melaksanakan secara fisik kegiatan-kegiatan sebagaimana disiapkan oleh *planning* dan *organizing*. Penggerakan ini perlu digunakan untuk merealisasikan perencanaan dan kegiatan nyata agar tercapai tujuan yang telah ditentukan sebelumnya. Dalam konteks manajemen pengelolaan penyewaan alat berat pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Poso, kegiatan menggerakkan pegawai (sebagai bawahan) agar mau bekerja dengan penuh kesadaran terhadap apa yang telah di rencanakan sebelumnya, adalah merupakan bagian yang tidak dapat di pisahkan dari kegiatan pengelolaan penyewaan alat berat pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Poso. Dalam hal ini, kegiatan menggerakkan pegawai (sebagai bawahan) dalam pengelolaan penyewaan alat berat yang ada pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Poso, tidak boleh dilakukan secara sewenang-wenang, sambil lalu, atau hanya sekedar iseng-iseng. Menggerakkan pegawai (sebagai bawahan) haruslah dilakukan benar-benar hanya untuk merealisasikan tujuan dari pada kegiatan pengelolaan penyewaan alat berat dimaksud, agar bilamana dalam pengelolaan penyewaan alat berat tersebut ada pegawai yang menyimpang dari apa yang telah direncanakan sebelumnya, atau ada pegawai yang terlalu lamban dalam merespon tugas yang telah diberikan kepadanya, dapat diberikan arahan atau bimbingan kepada mereka. Melalui penggerakkan pegawai (sebagai bawahan) seperti ini, atasan (sebagai pimpinan) dapat mengkomunikasikan hal-hal yang berkaitan dengan pengelolaan penyewaan alat berat kepada pegawai sebagai bawahannya, agar mereka dapat mengerti dan memahami dengan baik soal tujuan dari pada pengelolaan penyewaan alat berat itu sendiri.

Sehubungan dengan hal tersebut di atas, yang menjadi sorotan utama untuk membahas penggerakan pegawai, adalah hal - hal yang berkaitan dengan pemberian pengarahan yang dilakukan oleh atasan (sebagai pimpinan) kepada pegawai (sebagai bawahan) dalam hal pengelolaan penyewaan alat berat yang ada pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Poso. Bilamana pemberian pengarahan terhadap pegawai (khususnya pegawai yang dinilai lamban dalam merespon tugas yang telah diberikan kepada mereka) ada dilakukan oleh pimpinan, maka kegiatan menggerakkan pegawai dalam pengelolaan

penyewaan alat berat yang ada pada Dinas Pekerjaan Umum dapat dikatakan sudah dilakukan sebagaimana yang diharapkan. Sebaliknya, bilamana pemberian pengarahan terhadap pegawai (khususnya pegawai yang dinilai lamban dalam merespon tugas yang telah diberikan kepada mereka) tidak ada dilakukan oleh pimpinan, maka kegiatan menggerakkan pegawai dalam pengelolaan penyewaan alat berat yang ada pada Dinas Pekerjaan Umum dapat dikatakan belum dilakukan sebagaimana yang diharapkan.

Bertolak dari apa yang telah diuraikan terlebih dahulu di atas, dari hasil observasi peneliti pada objek penelitian, di peroleh gambaran bahwa kegiatan menggerakkan pegawai dalam pengelolaan penyewaan alat berat yang ada pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Poso (khususnya dalam memberikan bimbingan), belum dilakukan sebagaimana yang diharapkan. Masih seringnya terjadi kekeliruan yang dilakukan oleh pegawai ketika mereka di tugaskan untuk melaksanakan tugas pengoperasionalan alat berat serta lambannya pegawai dalam merespon tugas pekerjaan yang sudah diberikan kepada mereka, adalah fakta yang memberikan petunjuk bahwa penggerakkan pegawai yang sudah dilakukan oleh unsure pimpinan yang ada pada Dinas Pekerjaan Umum (khususnya unsure pimpinan Bidang Bina Marga) selama ini, belum seperti yang diharapkan. Masih seringnya terjadi kekeliruan pegawai dalam melaksanakan tugas pengoperasionalan alat berat dimaksud, antara lain bisa di lihat dari waktu ketika mereka menoperasikan alat berat yang dalam hal ini telah di sewa oleh pengguna jasa. Dalam penoperasikan alat berat tersebut, tidak jarang waktu yang di pakai untuk pengoperasionalan alat berat tersebut, sering sudah melewati batas waktu yang sudah disepakati bersama sebelumnya yang dalam hal ini Dinas Pekerjaan Umum (sebagai pemilik alat berat) dan pengguna jasa (sebagai pihak penyewa). Seperti waktu dalam kontrak misalnya, sudah di sepakati bahwa pengoperasionalan alat berat dimulai dari jam 08.00 s/d jam 17.00, akan tetapi biasanya sudah melewati hingga jam 18.00. Atau sebaliknya, waktu operasional yang seharusnya dimulai dari jam 08.00, akan tetapi sudah di mulai lebih awal yakni jam 07.00. Demikian halnya dengan lambannya pegawai dalam merespon tugas pekerjaan yang sudah diberikan kepada mereka. Hal ini antara lain bisa dilihat dari; pegawai yang masih sering dengan sengaja atau tidak sengaja mengulur-ngulur waktu ketika mereka di perintahkan untuk melaksanakan tugas, khususnya tugas yang berkaitan dengan pemeliharaan alat berat. Dalam pemeliharaan alat berat dimaksud (seperti; memperbaiki jika ada alat berat yang mengalami kerusakan), terkadang perintah untuk memperbaiki alat berat yang mengalami kerusakan tersebut tidak di respon dengan segera, melainkan nanti beberapa hari kemudian baru di tindaklanjuti. Akibatnya, hal ini selain berdampak pada bertambahnya waktu pemeliharaan alat berat tersebut, juga bertambah pada biaya pemeliharaannya.

Gambaran belum dilakukannya dengan baik penggerakkan pegawai seperti yang sudah di gambarkan tersebut di atas, sesungguhnya juga merupakan bagian dari gambaran yang memberikan petunjuk kegagalan dari pada pemberi perintah/ pemberi bimbingan (dalam hal ini pimpinan) dalam menggerakkan pegawai sebagai bawahannya. Sehubungan dengan hal ini, dari hasil wawancara peneliti

dengan beberapa narasumber, juga diperoleh gambaran yang sama dimana kegiatan pemberian pengarahan terhadap pegawai agar bilamana dalam pengelolaan penyewaan alat berat ada pegawai yang menyimpang dari apa yang telah direncanakan sebelumnya dapat di arahkan, atau ada pegawai yang terlalu lamban dalam merespon tugas yang telah diberikan kepadanya dapat diberikan pengarahan, belum dilakukan sebagaimana yang diharapkan. Sehubungan dengan hal ini, berikut akan di tampilkan kutipan hasil wawancara peneliti dengan narasumber “ R “ dalam suatu wawancara, mengatakan;“ Jarang memang Pak’ dilakukan semacam pemberian pengarahan atau pembimbingan kepada pegawai seperti yang Bapak maksud. Kalau yang saya ketahui, pengarahan dan pembimbingan yang sudah dilakukan selama ini, sifatnya sangat formal. Artinya, kegiatan-kegiatan tersebut hanya dilakukan dalam pertemuan-pertemuan resmi. Dalam pertemuan-pertemuan resmi seperti ini, jarang kita sebagai bawahan terlibat di dalamnya. Jadi kita tidak tahu persis soal seperti apa atau bagaimana yang terbaik di dalam rangka kami menjalankan tugas yang sudah diberikan kepada kami“(Wawancara, Mei 2023). Dengan nada yang sama, juga seperti yang diungkapkan oleh narasumber “ D “ dalam suatu wawancara yang berbeda, mengatakan; “ Benar Pak’ seperti yang sudah dikatakan oleh teman tadi. Jarang dan bahkan tidak pernah dilakukan pengarahan atau pembinaan seperti yang Bapak maksud. Jadi jangan heran misalnya kalau masih ada ditemukan pegawai yang melakukan kekeliruan-kekeliruan terkait dengan pelaksanaan tugas yang sudah diberikan kepada mereka. Begitu juga dalam hal pemeliharaan alat berat seperti yang Bapak maksud. Dalam melakukan pemeliharaan alat berat tersebut, selain kita tidak tahu persis sampai kapan batas waktu pemeliharaan alat berat tersebut, juga kita tidak tahu berapa biaya yang disediakan untuk pemeliharaan alat berat tersebut Artinya, bilamana kita mengetahui batas waktu dan biaya yang di peruntukkan untuk pemeliharaan alat berat tersebut, tentunya kita akan berusaha, agar secepatnya alat berat tersebut di perbaiki“(Wawancara, Mei 2023).

Dari hasil wawancara seperti yang terlihat di atas, jelas sekali memberikan cerminan pada kita bahwa sesungguhnya pegawai (sebagai bawahan) belum mengetahui persis soal bagaimana seharusnya melaksanakan tugas pekerjaan yang sudah diberikan kepada mereka agar dalam pelaksanaannya benar-benar sesuai dengan apa yang diharapkan. Bertolak dari hasil observasi dan hasil wawancara seperti yang sudah di paparkan tersebut di atas, maka dengan demikian dapat disimpulkan bahwa kegiatan menggerakkan pegawai agar mereka dapat melakukan tugas pekerjaannya sesuai dengan yang sudah di tetapkan sebelumnya, adalah belum dilakukan sebagaimana yang diharapkan.

d. Controlling (Pengawasan)

Pengawasan adalah keseluruhan aktivitas mengawasi, memeriksa, mencocokkan, dan mengedalikan segenap kegiatan agar berlangsung sesuai dengan rencana yang di tetapkan dan hasil yang di kehendaki. Pengawasan demikian tidaklah semata-mata di maksudkan untuk menemukan dan membetulkan kesalahan-kesalahan, melainkan justru mencegah terjadinya kekeliruan - kekeliruan atau

penyimpangan - penyimpangan yang sebetulnya dapat di hindarkan sebelum terlambat. Jika pengawasan terhadap pengelolaan penyewaan alat berat pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Poso seperti ini dapat di lakukan dengan baik, sudah dapat di pastikan bahwa pengelolaan penyewaan alat berat dimaksud dapat berjalan sebagaimana yang diharapkan. Sebaliknya, bilamana pengawasan terhadap pengelolaan penyewaan alat berat pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Poso seperti ini tidak dapat di lakukan dengan baik, sudah dapat di pastikan bahwa pengelolaan penyewaan alat berat dimaksud tidak akan dapat berjalan sebagaimana yang diharapkan.

Sehubungan dengan hal tersebut, yang menjadi sorotan utama terkait dengan kegiatan pengawasan terhadap pengeolaan alat berat yang ada pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Poso, adalah terhadap penggunaan alat berat ketika digunakan oleh pengguna jasa dan pengawasan terhadap pemeliharaan terhadap alat berat, seperti; traktor, stongwals, dll. Berdasarkan hasil pengamatan peneliti terhadap objek yang di teliti, di peroleh gambaran bahwa kegiatan pengawasan terhadap penggunaan alat berat ketika digunakan oleh pengguna jasa dan pengawasan terhadap pemeliharaan terhadap alat berat, seperti; traktor, stongwals, dll, dalam berbagai hal dapat dikatakan belum di lakukan dengan baik. Hal ini juga seperti yang di akui oleh salah seorang narasumber “ J “ dalam suatu wawancara, mengatakan : “ Kalau yang saya ketahui selama ini, jarang memang di lakukan pengawasan terhadap penggunaan alat berat ketika digunakan oleh pengguna jasa. Apalagi kalau alat berat tersebut di gunakan pada tempat yang agak jauh dari Poso pengawasannya praktri tidak pernah dilakukan “. (Wawancara, Mei 2023). Selanjutnya dengan nada yang sama juga di akui oleh salah seorang narasumber “ N “ dalam suatu wawancara yang berbeda, mengatakan :“ Jarang dan bahkan tidak pernah Pak’ di lakukan pengawasan langsung seperti yang Bapak maksud. Justru biasanya selama ini, kita sebagai operator yang memberitahukan langsung kalau ada alat yang perlu di perbaiki. Kalau kita yang ditanyakan langsung, itu praktis tidak pernah “(Wawancara, Mei 2023).

Kutipan hasil wawancara tersebut di atas, jelas sekali memberikan gambaran pada kita bahwa selama ini tidak pernah ada di lakukan pengawasan terhadap penggunaan alat berat ketika digunakan oleh pengguna jasa dan pengawasan terhadap pemeliharaan terhadap alat berat, seperti; traktor, stongwals, dll. Padahal pengawasan terhadap penggunaan alat berat ketika digunakan oleh pengguna jasa dan pengawasan terhadap pemeliharaan terhadap alat berat, seperti; traktor, stongwals, dll tersebut, penting untuk di lakukan guna mengecek, memeriksa, agar semua kegiatan (pengoperasionalan dan pemeliharaan) tersebut dapat diketahui langsung; apakah sudah berjalan dengan baik atau ada kendala/ hambatan, untuk kemudian dicarikan solusinya. Demikian halnya dengan pemeliharaan alat berat tersebut. Dengan adanya pengawasan secara langsung terhadap pemeliharaan alat berat tersebut, selain unsure pimpinan dapat melihat dan mengetahui secara langsung soal keberadaan/ kondisi dari pada alat berat tersebut, juga dapat dengan cepat unsure pimpinan mengambil tindakan bilamana ada alat berat yang bermasalah untuk kemudian dicarikan solusinya. Sehingga nantinya diharapkan, semua kegiatan yang berkaitan dengan pengoperasionalan dan pemeliharaan alat berat tersebut dapat terlaksana dan

terselesaikan sesuai dengan rencana dan hasil yang di kehendaki. Selain itu, dengan adanya kegiatan pengawasan terhadap alat berat seperti ini, kekeliruan atau penyimpangan dalam pengelolaan penyewaan alat berat dimaksud, boleh terhindarkan.

Bertolak dari hasil observasi dan hasil wawancara seperti yang sudah dikemukakan tersebut di atas, maka dengan demikian dapat di simpulkan bahwa pengawasan terhadap pengelolaan penyewaan alat berat pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Poso, belum di lakukan sebagaimana yang diharapkan.

e. **Faktor yang mempengaruhi**

Fungsi manajemen dalam pengelolaan penyewaan alat berat pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Poso, adalah tidak lain di tujukan untuk mengatur atau menata serta mengendalikan segala tugas pekerjaan yang meliputi sejumlah aktivitas yang saling tergantung satu sama lain. Sebagai bagian dari fungsi manajemen dalam pengelolaan penyewaan alat berat pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Poso, fungsi perencanaan, pengorganisasian, penggerakkan, dan pengawasan terhadap pengelolaan penyewaan alat berat pada Dinas Pekerjaan Umum dimaksud adalah bagian yang tidak terpisahkan dari kegiatan manajemen itu sendiri. Pada tataran inilah, peran seorang pimpinan di dalam menjalankan fungsi manajemen tersebut di nilai sangat penting. Artinya, peran seorang pemimpin di dalam menjalankan kepemimpinannya sangat diperlukan dalam usaha menetapkan tujuan, mengalokasikan sumberdaya, memfokuskan perhatian pada tujuan-tujuan organisasi, mengkoordinasikan perubahan-perubahan yang terjadi, membina kontak antar pribadi dengan pengikutnya, dan menetapkan arah yang benar atau yang paling baik bila kegagalan terjadi (Gibson, Ivanchevich, & Donnely, 1996).

Dalam hal ini dapat di katakan bahwa dengan adanya kepemimpinan yang baik, proses manajemen pengelolaan penyewaan alat berat pada Dinas Pekerjaan Umum akan berjalan lancar dan pegawai (sebagai bawahan) akan lebih bergairah melaksanakan tugas-tugasnya. Gairah kerja, efektifitas kerja, dan proses manajemen pengelolaan penyewaan alat berat pada Dinas Pekerjaan Umum akan baik, jika tipe, gaya, cara atau style kepemimpinan yang diterapkan pimpinannya baik. Tegasnya, sukses tidaknya atau terlaksana tidaknya fungsi manajemen yang terkait dengan perencanaan, pengorganisasian, penggerakkan dan pengawasan terhadap pengelolaan penyewaan alat berat pada Dinas Pekerjaan Umum, sebagian besar ditentukan oleh kecakapan dan kewibawaan pimpinan dalam menjalankan kepemimpinannya. Kecakapan dan kewibawaan seorang pimpinan dalam menjalankan kepemimpinannya, akan mendorong gairah kerja pegawai yang ada pada Dinas Pekerjaan Umum, khususnya gairah kerja dalam pengelolaan penyewaan alat berat. Adapun kecakapan dan kewibawaan pimpinan di maksud, adalah; kecakapan dan kewibawaan yang terkait dengan pelaksanaan manajemen itu sendiri.

Sehubungan dengan hal tersebut, berdasarkan hasil observasi peneliti pada objek yang di teliti, diperoleh gambaran bahwa kepemimpinan yang sudah dijalankan oleh unsur pimpinan yang ada pada

Dinas Pekerjaan Umum (khususnya unsur pimpinan yang ada pada Bagian Bina Marga) dalam mendorong terciptanya pengelolaan penyewaan alat berat yang ada pada Dinas bersangkutan menjadi lebih efektif dan efisien, dalam berbagai hal dapat dikatakan belum seperti yang diharapkan. Faktor kurangnya kecakapan dan kewibawaan pimpinan dalam menjalankan fungsi manajemen sebagai perencanaan, pengorganisasian, penggerakan, dan pengawasan, adalah faktor yang dinilai sebagai faktor yang mempengaruhi sehingga pengelolaan penyewaan alat berat yang ada pada Dinas Pekerjaan Umum belum terlaksana sebagaimana yang diharapkan. Terkait dengan hal ini, gambaran yang dapat menunjukkan bahwa kecakapan dan kewibawaan pimpinan dalam menjalankan fungsi manajemen sebagai perencanaan, pengorganisasian, penggerakan, dan pengawasan adalah belum seperti yang diharapkan, adalah sebagai berikut; Naik turunnya jumlah pendapatan dari hasil penyewaan alat berat dari tahun 2012 sampai 2016 (Lihat tabel 1), adalah fakta yang memberikan petunjuk bahwa kecakapan unsur pimpinan dalam menjalankan fungsi perencanaan terhadap pengelolaan penyewaan alat berat yang ada pada Dinas Pekerjaan Umum, belum seperti yang diharapkan.

Tidak jelasnya soal siapa yang akan mengoperasikan alat berat ketika alat berat tersebut akan digunakan/ di pakai oleh penyewa/ pengguna jasa pada waktu itu, serta siapa yang akan mengawasi ketika alat berat tersebut akan digunakan pada waktu itu, adalah fakta yang memberikan petunjuk bahwa kecakapan unsur pimpinan dalam menjalankan fungsi pengorganisasian tugas pekerjaan dalam pengelolaan penyewaan alat berat yang ada pada Dinas Pekerjaan Umum, belum seperti yang diharapkan. Masih seringnya terjadi kekeliruan penoperasionalan alat berat ketika digunakan oleh pengguna jasa, serta lambannya pegawai dalam merespon tugas pekerjaan yang telah diperintahkan oleh pimpinan, adalah fakta yang memberikan petunjuk bahwa kecakapan unsur pimpinan dalam menjalankan fungsi penggerakkan dalam pengelolaan penyewaan alat berat yang ada pada Dinas Pekerjaan Umum, belum seperti yang diharapkan. Kurangnya, bahkan praktis tidak pernah dilakukan pemeriksaan atau pengecekan terhadap alat berat ketika alat berat dimaksud di operasionalkan, serta pemeriksaan atau pengecekan terhadap pemeliharaan alat berat, adalah fakta yang memberikan petunjuk bahwa kecakapan unsur pimpinan dalam menjalankan fungsi pengawasan terhadap pengelolaan penyewaan alat berat yang ada pada Dinas Pekerjaan Umum, belum seperti yang diharapkan. Hasil observasi yang terkait dengan kurangnya kecakapan dan kewibawaan unsur pimpinan dalam pengelolaan penyewaan alat berat yang ada pada Dinas Pekerjaan Umum seperti yang sudah dipaparkan di atas, juga diketahui dari hasil wawancara peneliti dengan beberapa narasumber seperti yang terlihat pada kutipan beriktu di bawah ini.

“ Dalam hal unsur pimpinan kami menjalankan kepemimpinannya selama ini, memang sangat berpengaruh terhadap pengelolaan penyewaan alat berat yang ada di Dinas ini. Artinya, efektif tidaknya manajemen pengelolaan penyewaan alat berat tersebut, sangat di tentukan oleh kecakapan dan kewibawaan pimpinan kami. Kalau melihat manajemen pengelolaan penyewaan alat berat yang sudah dilakukan selama ini, menurut saya belum di dukung dengan kecakapan dan kewibawaan pimpinan

kami karena kalau dilihat dari segi pendapatannya, dari tahun ke tahun tidak mengalami peningkatan. Itu berarti, manajemen pengelolaan penyewaan alat berat yang sudah dilakukan selama ini, tidak di dukung dengan kecakapan dan kewibawaan pimpinan kami “ (Wawancara, Mei 2023). Dengan nada yang sama, juga diakui oleh narasumber lain berinisial “R“, dalam suatu wawancara yang berbeda, mengatakan : “ Intinya ada sama pimpinan kami Pak’. Dalam hal ini bisa dikatakan, bahwa efektif tidaknya manajemen pengelolaan penyewaan alat berat tersebut, sangat di tentukan oleh kecakapan dan kewibawaan pimpinan kami. Kalau di lihat dari kecakapan dan kewibawaan unsur pimpinan kami dalam melakukan perencanaan, pengorganisasian, penggerakkan, dan pengawasan seperti yang Bapak maksud, menurut saya belum optimal. Tidak menetapnya hasil yang diperoleh dari penyewaan alat berat, lambannya pegawai merespon perintah pimpinan, batas tugas dan tanggung jawab pegawai terhadap tugas pekerjaannya, serta kurangnya dilakukan pengawasan langsung terhadap pengoperasian dan perawatan alat berat, adalah fakta yang memberikan petunjuk kalau kecakapan dan kewibawaan pimpinan dalam pengelolaan penyewaan alat berat yang ada di Dinas kami, belum seperti yang diharapkan ... “ (Wawancara, Mei 2023).

Hasil wawancara seperti yang terlihat di atas, jelas sekali memberikan gambaran pada kita bahwa selama ini yang diketahui oleh pegawai (sebagai bawahan) terkait dengan manajemen pengelolaan penyewaan alat berat yang ada pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Poso, adalah belum di dukung dengan kecakapan dan kewibawaan pimpinan yang ada pada Dinas. Dalam hal ini, pegawai menilai bahwa kepemimpinan yang sudah dijalankan oleh unsur pimpinan selama ini, adalah belum dapat mendorong meningkatnya kegiatan manajemen pengelolaan penyewaan alat berat yang ada pada Dinas Pekerjaan Umum. Bertolak dari hasil observasi dan hasil wawancara seperti yang sudah di paparkan di atas, maka dengan demikian dapat di simpulkan bahwa faktor kepemimpinan dapat mempengaruhi optimal tidaknya manajemen pengelolaan penyewaan alat berat yang ada pada Dinas Pekerjaan Umum.

PENUTUP

Bertolak dari hasil pembahasan yang sudah dilakukan pada Bab IV sebelumnya, maka kesimpulan yang dapat di tarik dari masing-masing indikator yang digunakan dalam penelitian adalah ; Bahwa perencanaan yang terkait dengan waktu dan biaya operasional alat berat yang ada pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Poso, adalah belum dilakukan secara optimal. Bahwa pengorganisasian yang terkait dengan pembagian tugas serta batas tugas dan tanggung jawab pegawai dalam pengelolaan penyewaan alat berat yang ada pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Poso, adalah belum dilakukan sebagaimana yang diharapkan alias kurang jelas. Bahwa penggerakkan yang terkait dengan kegiatan menggerakkan pegawai dalam pengelolaan penyewaan alat berat yang ada pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Poso (khususnya dalam memberikan bimbingan), belum dilakukan sebagaimana yang diharapkan. Bahwa pengawasan terhadap penggunaan alat berat ketika digunakan oleh pengguna jasa dan pengawasan terhadap pemeliharaan terhadap alat berat, seperti; traktor, stongwals, dll, dalam berbagai hal dapat dikatakan belum di lakukan dengan baik. Adapun

faktor yang dinilai berpengaruh terhadap manajemen pengelolaan penyewaan alat berat pada Dinas Pekerjaan Umum, adalah faktor kepemimpinan.

DAFTAR PUSTAKA

- Anonim, 1988. Kepmen Pekerjaan Umum. Nomor 585/KPTS/1988; Pedoman Penggunaan Peralatan di Lingkungan Departemen Pekerjaan Umum.
- Anonim, 1999 UU Nomor 25 tahun 1999, Tentang Perimbangan Keuangan Antara Pusat dan Daerah
- APPAKSI. 2010. Daftar Harga Sewa Alat Berat (<http://APPAKSI.com/>.dakses 10 Februari 2011).
- Arikunto, S. 2000, Manajemen Penelitian. Jakarta: PT. Rineka Cipta Brata, S.S, 1983. Metode Penelitian. Jakarta: Rajawali
- Dean, S. 1985, Kepemimpinan Dalam Organisasi dan Manajemen. Bandung: Sinar Baru Dharma, A. 1985. Manajemen Prestasi Kerja, Jakarta: Rajawali Fatena.R.S.2002. Alat Berat Untuk Proyek Konstruksi, Jakarta
- Gibson, 1996. Perilaku Organisasi. Jakarta: Erlangg
- Gibson, James L., John M. Ivancevich dan James H. Donnely Jr. 1996. Organisasi: Perilaku, Struktur, Proses. (Terjemahan) Edisi Delapan. Jakarta, Binarupa Aksara.
- Gie, T. L. 1991. Cara Kerja Efisien. Yogyakarta: Karya Rencana H. Malayu, SP Hasibuan, 1996, Manajemen Personalia dan Sumber-saya Manusia, Edisi II, BPFE, Yogyakarta.
- Hadi, S. 1983, Research Methodology. Yogyakarta: Sinar Baru
- Handoko, Hani, 2002. Dasar-Dasar Manajemen Produksi dan Operasi, Edisi I, BPFE, Yogyakarta Hersey dan Blanchard, 1982, Kompetensi dan Ukurannya, Ghalia Indonesia, Jakarta.
- Indra, A.J. 1995, Perubahan dan Pengembangan Organisasi. Bandung: Sinar Baru.
- Kartono K (2003), Pemimpin dan Kepemimpinan, Penerbit Raja Grafindo Persada, Jakarta
- Lay Cornelius dkk, 2002 Desentralisasi dan Demokrasi kerjasama Fisipol UGM Yogyakarta
- Lukman Sampara, Manajemen Kualitas Pelayanan, STIA LAN, Jakarta, 1999 hal 14
- Manulang, S. 1995 Manajemen Sumber Daya Manusia. Cetakan Pertama. Yogyakarta: STIE YKPN.
- Moenir, A.S. 1980. Pendekatan Manusia dan Organisasi Terhadap Pembinaan Kepegawaian. Jakarta: Gunung Agung Nugroho, A. 1996 Tata tertib Manajemen. Surabaya: Penerbit Indah Sugiono 2000.
- Metode Penelitian Administratif. Bandung: CV. Alfabeta
- Rochmanhadi, 1985. Perhitungan Biaya Pelaksanaan Pekerjaan dengan Menggunakan Alat Berat, Jakarta Badan Penerbit Pekerjaan Umum
- Rochmanhadi, 1992. Alat Berat dan Penggunaannya, Jakarta Penerbit Pekerjaan Umum
- Sianipar, J.P.G.1996. Manajemen Pelayanan Masyarakat. Yogyakarta: BPFE.